

PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia)

Hafidh Susila Sudarsana, Shiddiq Nur Rahardjo¹

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

This study aims to provide empirical evidence on effect of the characteristics of local government (size, level of wealth, dependence level and government expenditures) and the audit findings to the performance of local government. Local government performance is measured by scores on the evaluation of local government performance (EKPPD) derived from local government organizers report (LPPD).

Population of this research is all the district/city in Indonesia during 2010. Total this sample are 367 local government using purposive sampling. Examination of hypothesis conducted by using ordinal logistic regression (PLUM) in SPSS 19 software.

Results of this study indicate that level of wealth significant positive effect on the performance of local government districts/cities in Indonesia, to audit findings significant negative effect on the performance of local government districts/cities in Indonesia. While size, capital expenditures and level of dependence had no significant effect to the performance of local government districts/cities in Indonesia.

Keywords: characteristic of local government, local government performance, local government performance reporting, evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD), laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD), audit findings.

PENDAHULUAN

TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 merupakan landasan hukum dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Hendriyadi, 2011), kemudian mengalami revisi menjadi UU No. 32 tahun 2004 (UU No. 32/2004) yang menegaskan bahwa kewenangan Pemda untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi.

UU No. 32/2004 selain memberikan kewenangan otonomi kepada Pemda juga mewajibkan tiap kepala daerah untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada pemerintah pusat. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 (PP No. 3/2007) tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat menyebutkan bahwa ruang lingkup LPPD mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Penyelenggaraan urusan desentralisasi meliputi urusan wajib dan pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. Sedangkan urusan pilihan merupakan urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. Dengan demikian, isi dari LPPD Pemda kabupaten/kota sangat tergantung dengan urusan yang menjadi tanggung jawabnya dan karakteristik dari masing-masing Pemda tersebut (Mustikarini dan Fitriyani, 2012).

PP No. 6/2008 menyebutkan bahwa salah satu evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah berupa evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD). Setelah itu dilengkapi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2009 (Permendagri No. 73/2009) tentang tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Permendagri Nomor 74 Tahun 2009 tentang pedoman pemberian penghargaan kepada

¹ Corresponding author

penyelenggara pemerintahan daerah. Pasal 5 Permendagri No. 73/2009 ini disebutkan bahwa EKPPD menggunakan LPPD sebagai sumber informasi utama.

Metode EKPPD dilakukan dengan menilai total indeks komposit kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Total Indeks komposit kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan penjumlahan hasil penilaian yang meliputi indeks capaian kinerja dan indeks kesesuaian materi. Indeks capaian kinerja diukur dengan menilai IKK pada aspek tataran pengambil kebijakan dan pelaksanaan kebijakan.

Pemerintah Daerah dalam melayani masyarakat melakukan pengelolaan atas keuangan daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, LPPD suatu pemda merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dan memerlukan pengawasan serta pemeriksaan (audit) yang baik agar tidak terjadi kecurangan. Di Indonesia, pemeriksaan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriasari (2012). Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan variabel-variabel yang ada pada penelitian yang dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriasari (2012). Variabel-variabel yang digunakan diantaranya ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dan temuan audit BPK. Selain itu peneliti juga menambahkan variabel independen lain yang termasuk dalam karakteristik pemerintah daerah, yaitu belanja modal.

Belanja modal biasanya terkait erat dengan penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Nugroho dan Rohman (2012) Pemerintah akan melakukan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang diperlukan oleh negara, yang tercermin di dalam belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah. Belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah, sesuai dengan logika, semakin banyak sumber yang menghasilkan, maka hasilnya pun akan semakin banyak.

Peneliti ini menggunakan hasil EKPPD tahun 2010, karena dengan menggunakan data tahun terkini diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan untuk kondisi saat ini tentang kinerja pemerintah daerah. Motivasi penelitian ini adalah untuk mengkonfirmasi penelitian Mustikarini dan Fitriasari (2012) dan mengetahui apakah variabel belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja Pemda kabupaten/kota?
2. Apakah tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja Pemda kabupaten/kota?
3. Apakah tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap kinerja Pemda kabupaten/kota?
4. Apakah belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja Pemda kabupaten/kota?
5. Apakah temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja Pemda kabupaten/kota?

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori utama yang mendasari penelitian mengenai pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah dijelaskan melalui perspektif teori agensi. Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan adanya hubungan kerja antara pemilik (*principal*) dengan manajemen (*agen*). Adanya pemisahan kepemilikan oleh *principal* dengan pengendalian oleh agen dalam sebuah organisasi cenderung menimbulkan konflik keagenan diantara *principal* dan agen (Jensen dan Meckling, 1976). Di satu sisi, *agen* secara moral bertanggung jawab mengoptimalkan keuntungan *principal*, namun di sisi lain manajemen juga berkepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri. Sehingga cenderung menimbulkan masalah agensi.

Pada dasarnya organisasi sektor publik dibangun atas dasar *agency theory*, diakui atau tidak di pemerintahan daerah terdapat hubungan dan masalah keagenan (Halim dan Abullah, 2005). Menurut Lane (2000) teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen. Hal yang

sama dikemukakan oleh Moe (1984) yang menjelaskan konsep ekonomis organisasi sektor publik dengan menggunakan teori keagenan. Bergman dan Lane (1990) dalam Setiawan (2012) menyatakan bahwa kerangka hubungan prinsipal agen merupakan satu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik.

Mardiasmo (2002) menjelaskan tentang akuntabilitas dalam konteks sektor publik bahwa, pengertian akuntabilitas sebagai kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pernyataan ini mengandung arti bahwa dalam pengelolaan pemerintah daerah terdapat hubungan keagenan (teori keagenan) antara masyarakat sebagai *principal* dan pemerintah daerah sebagai *agent*.

Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai *agent* bagi masyarakat *principal* akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat. *Agency theory* beranggapan bahwa banyak terjadi *information asymmetry* antara pihak agen (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak *principal* (masyarakat). Adanya *information asymmetry* inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh agen. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan akuntabilitas atas kinerjanya sebagai mekanisme *checks and balances* agar dapat mengurangi *information asymmetry* (Setiawan, 2012).

Berdasar *agency theory* pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Menurut Undang-Undang No.15 tahun 2004 (UU No.15/2004) Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih berimbang terhadap pemerintah daerah yang itu artinya *informatif asymmetry* yang terjadi dapat berkurang. Dengan semakin berkurangnya *information asymmetry* maka kemungkinan untuk melakukan korupsi juga menjadi lebih kecil (Setiawan, 2012).

Salah satu wujud pengawasan itu, di Indonesia dibentuk satu badan audit independen untuk mengaudit seluruh Pemda di Indonesia. Di Indonesia, pengawasan tersebut dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan BPK tersebut berupa opini, temuan, kesimpulan atau dalam bentuk rekomendasi.

Akuntabilitas

Dalam konteks organisasi pemerintah sering ada istilah akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah baik pusat maupun daerah harus bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

Salah satu elemen penopang akuntabilitas adalah transparansi. Transparansi digambarkan sebagai “ketersediaan informasi kepada publik atas transaksi pemerintah dan proses pengambilan keputusan, dan merupakan dasar untuk manajemen di semua negara demokrasi”. Transparansi berarti bahwa individu, grup, atau organisasi dalam hubungan akuntabilitas diarahkan tanpa adanya kebohongan atau motivasi yang tersembunyi, dan bahwa seluruh informasi kinerja lengkap dan tidak memiliki tujuan menghilangkan data yang memiliki hubungan dengan masalah tertentu (Mahsun, 2006).

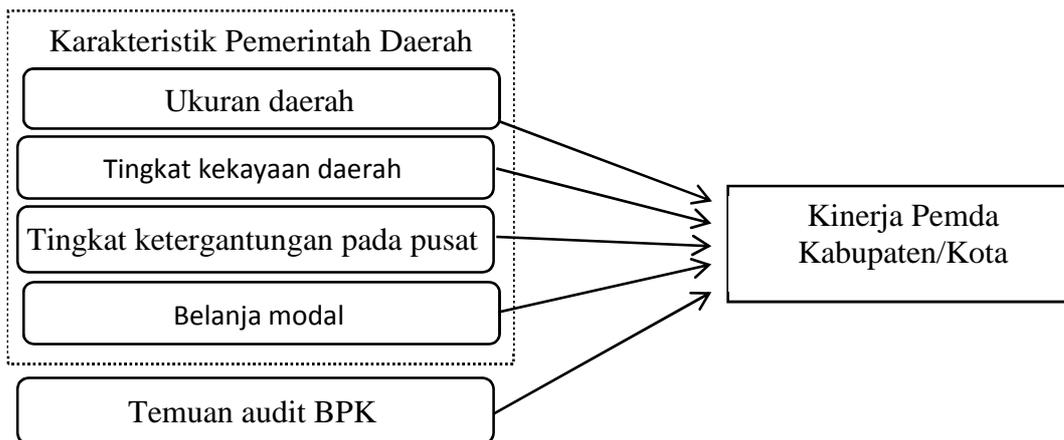
Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi

diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik (Rahmanurrajjid, 2008).

Untuk mewujudkan transparansi itu, maka dikeluarkan PP Nomor 3 Tahun 2007 pasal 2 tentang laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Selain itu pasal 9 PP Nomor 3 Tahun 2007 juga menegaskan bahwa penyusunan LPPD menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Kerangka Pemikiran Teoritis

Gambar 1: Kerangka Pemikiran Teoritis



Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Skor Kinerja Pemda Kabupaten/Kota

Tujuan utama dari program kerja Pemda adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Untuk memberikan pelayanan yang baik, harus didukung oleh aset yang baik pula. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, semakin besar ukuran daerah yang ditandai dengan besarnya jumlah aset Pemda, maka diharapkan akan semakin tinggi kinerja Pemda tersebut (Mustikarini dan Fitriyasi, 2012).

Hipotesis 1: Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota.

Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah terhadap Skor Kinerja Pemda Kabupaten/Kota

Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD akan sangat berperan dalam kemandirian pemerintah daerah yang dapat dikatakan sebagai kinerja pemerintah daerah (Florida, 2007 dalam Nugroho, 2012). Sumarjo (2010) juga menjelaskan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor pendukung dari kinerja ekonomi makro. Pertumbuhan yang positif mendorong adanya investasi sehingga secara bersamaan investasi tersebut akan mendorong adanya perbaikan infrastruktur daerah. Infrastruktur daerah yang baik serta investasi yang tinggi di suatu daerah akan meningkatkan PAD Pemda tersebut. Adi (2006) dalam Sumarjo (2010) menyebutkan bahwa peningkatan PAD seharusnya didukung dengan peningkatan kualitas layanan publik. Dimana kualitas layanan publik yang baik akan mencerminkan kinerja yang baik suatu Pemda.

Hipotesis 2: Tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota.

Pengaruh Tingkat Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat terhadap Skor Kinerja Pemda Kabupaten/Kota

Semakin besarnya penerimaan DAU oleh satu daerah maka Pemerintah akan lebih memantau pelaksanaan dari alokasi DAU dibanding dengan daerah yang lebih sedikit penerimaannya. Hal ini memotivasi Pemda untuk berkinerja lebih baik karena pengawasan dari Pemerintah Pusat lebih besar. Dengan demikian, semakin tinggi DAU dari Pemerintah Pusat maka

diharapkan semakin baik pelayanan Pemda kepada masyarakatnya sehingga kinerja Pemda juga semakin meningkat. Dari uraian di atas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

Hipotesis 3: Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Skor Kinerja Pemda Kabupaten/Kota

Belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. Sehingga semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga kinerja daerah akan lebih baik. Oleh karena itu, hipotesis pada penelitian ini adalah:

Hipotesis 4: Belanja modal berpengaruh positif terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota.

Pengaruh Temuan Audit terhadap Skor Kinerja Pemda Kabupaten/Kota

Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan Pemda atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Semakin banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Pemda menggambarkan semakin buruknya kinerja Pemda tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi angka temuan audit, maka menunjukkan semakin rendahnya kinerja suatu Pemda.

Hipotesis 5: Temuan audit berpengaruh negatif terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Manajemen Laba (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu skor kinerja Pemda kabupaten/kota. Skor kinerja Pemda kabupaten/kota yang berasal dari laporan hasil evaluasi pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan LPPD tahun 2010 tingkat nasional dengan *range* nilai 0-4. Evaluasi dilakukan berdasarkan penilaian *portfolio* secara *desk evaluation* terhadap data yang dimuat dalam LPPD tahun 2010 dan penilaian lapangan terhadap prestasi kinerja yang dicapai oleh masing-masing pemerintah daerah. Evaluasi pemeringkatan kinerja Pemda ini baru pertama kali dilakukan untuk LPPD tahun anggaran 2007 yang diterbitkan di Jakarta tanggal 14 Agustus 2009 oleh Kementerian Dalam Negeri.

Variabel Ukuran Daerah

Ukuran (*size*) dapat diukur dengan berbagai cara, antara lain jumlah karyawan, jumlah aktiva, total pendapatan, dan tingkat produksi (Damanpour, 1991 dalam Suhardjanto, *et al*, 2011). Penelitian Mustikarini dan Fitriyasi (2012), Martani dan Zaelani (2011) serta Sumarjo (2010) ukuran pemerintah daerah dilihat dari jumlah total aset yang dimiliki. Penelitian ini menggunakan logaritma natural (Ln) dari total aset seperti pada penelitian Mustikarini dan Fitriyasi (2012). Hal ini dikarenakan besarnya total aset masing-masing Pemda berbeda bahkan mempunyai selisih yang besar, sehingga dapat menyebabkan nilai yang ekstrem. Untuk menghindari adanya data yang tidak normal tersebut maka data total aset perlu di Ln kan.

Variabel Tingkat Kekayaan Daerah

Di dalam penelitian sebelumnya, Mustikarini dan Fitriyasi (2012) menggunakan PAD dibandingkan dengan total pendapatan sebagai proksi pengukuran tingkat kekayaan daerah. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka pada penelitian ini variabel tingkat kekayaan diukur dengan rumus :

$$\text{Tingkat Kekayaan Daerah} = \frac{PAD}{\text{Total Pendapatan}}$$

Variabel Tingkat Ketergantungan dengan Pusat

Pada penelitian Mustikarini dan Fitriyasi (2012), tingkat ketergantungan dengan pusat diukur dengan besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) dibandingkan dengan total pendapatan. Variabel tingkat kekayaan diukur dengan rumus :

$$\text{Tingkat Ketergantungan dengan Pusat} = \frac{\text{DAU}}{\text{Total Pendapatan}}$$

Variabel Belanja Modal

Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (2012) menyatakan rasio belanja modal terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk membiayai belanja modal. Dimana realisasi belanja modal akan memiliki *multiplier effect* dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Maka pada penelitian ini variabel belanja modal diukur dengan rumus :

$$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Realisasi Belanja}}$$

Variabel Temuan Audit BPK

Pada penelitian Mustikarini dan Fitriyasi (2012), temuan audit BPK diukur dengan temuan audit (dalam rupiah) dibandingkan dengan total anggaran belanja. Konsisten dengan penelitian yang dilakukan Mustikarini dan Fitriyasi (2012), variabel temuan audit BPK penelitian ini menggunakan rumus :

$$\text{Temuan Audit} = \frac{\text{Temuan Audit (dalam rupiah)}}{\text{Total Anggaran Belanja}}$$

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah kota / kabupaten di Indonesia tahun 2010. Kriteria pengambilan sampel penelitian adalah *purposive* sampling dengan ketentuan Pemda kabupaten/kota yang dipilih memiliki semua data yang lengkap meliputi: Neraca untuk mendapatkan total aset, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk mendapatkan PAD, DAU, dan total realisasi anggaran pendapatan, serta memerlukan laporan hasil pemeriksaan BPK tahun 2010 untuk mendapatkan jumlah temuan audit.

Metode Analisis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi logistik ordinal atau PLUM (*Polytomous Universal Model*) sebagai berikut:

$$\text{logit(SCORE)} = \beta_0 + \beta_1 \text{Ln_TA} + \beta_2 \text{PAD} + \beta_3 \text{DAU} + \beta_4 \text{BM} + \beta_5 \text{Temuan}$$

Keterangan :

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: koefisien variabel independen

Ln_TA : Ukuran daerah

PAD : Tingkat kekayaan daerah

DAU : Tingkat ketergantungan dengan pusat

BM : Belanja modal

Temuan : Temuan audit BPK

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4 > 0$

$\beta_5 < 0$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten dan Kota se-Indonesia, dimana sumber data untuk variabel temuan audit BPK didapatkan dari Ikhtisar Pemeriksaan semester I dan II tahun 2011 pada website Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu <http://www.bpk.go.id>. Data Temuan audit yang digunakan dalam penelitian ini adalah temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan Pemda terhadap peraturan perundang-undangan tahun anggaran 2010. Data neraca untuk mendapatkan total aset, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk mendapatkan PAD, DAU, dan total realisasi anggaran pendapatan didapatkan melalui website <http://www.djpk.depkeu.go.id/>. Data peringkat skor kinerja pemda kabupaten/kota didapatkan melalui website <http://otda.kemendagri.go.id/>.

Populasi dari penelitian ini adalah sebanyak 524 pemerintah kabupaten dan kota tahun 2010. Atas dasar penentuan jumlah sampel yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya, maka diperoleh jumlah sampel akhir sebanyak 367 Pemda kabupaten/kota dengan proses pengambilan sampel bisa dilihat di tabel:

Tabel 1
Populasi dan Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah Pemda Kab/Kota
Jumlah Seluruh Pemda tahun 2010	524
Pemda setingkat provinsi	(33)
Pemda tidak menyampaikan LPPD 2010	(59)
Pemda dengan data tidak lengkap	(65)
Jumlah sampel akhir penelitian	367

Statistik Deskriptif

Hasil pengujian statistik deskriptif untuk ditunjukkan dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi terdapat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2 Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SC	367	1,00	4,00	2,9183	,46620
Ln_TA	367	25,72	31,12	28,0463	,63215
PAD	367	,0075	,3465	,060703	,0452665
DAU	367	,0015	,8271	,586211	,1437235
BM	367	,0385	,4982	,207384	,0957830
TEMUAN	367	,0000	,4820	,014737	,0431831
Valid N (listwise)	367				

Sumber : data sekunder yang diolah, 2013.

Standar deviasi untuk skor kinerja Pemda kabupaten/kota yang telah di konversi, menunjukkan rata-rata sebesar 2,918 yang berarti secara rata-rata kinerja Pemda baik karena berada pada kriteria prestasi tinggi. Standar deviasi menunjukkan nilai 0,46620, hal ini berarti data memiliki nilai yang heterogen. Untuk ukuran daerah, memiliki nilai rata-rata sebesar 28,0563. Standar deviasi menunjukkan nilai 0,63215, hal ini berarti data memiliki nilai yang heterogen. Tingkat kekayaan daerah yang diukur dengan PAD dibandingkan dengan total pendapatan memiliki rata-rata sebesar 6,1%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kekayaan daerah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2010 secara rata-rata porsi PAD pada total pendapatan Pemda masih sangat kecil. Standar deviasi menunjukkan nilai 0,0452665, hal ini berarti data memiliki nilai yang homogen. Tingkat ketergantungan dengan pusat diukur dengan besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) dibandingkan dengan total pendapatan memiliki rata-rata sebesar 58,6%, ini menandakan bahwa porsi Dana Alokasi Umum (DAU) dalam total pendapatan Pemda untuk tahun

anggaran 2010 masih sangat besar. Hal ini juga menandakan bahwa ketergantungan Pemda kabupaten/kota di Indonesia terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi karena nilainya di atas 50%. Standar deviasi menunjukkan nilai 0,1437235 hal ini berarti data memiliki nilai yang homogen. Belanja Modal diukur dengan besarnya belanja modal dibandingkan dengan total realisasi belanja memiliki rata-rata sebesar 20,7%. Standar deviasi menunjukkan nilai 0,0957830, hal ini berarti data memiliki nilai yang homogen. Untuk variabel temuan audit, nilai rata-rata sebesar 0,0147 yang artinya secara rata-rata temuan audit di Pemda kabupaten/kota tahun 2010 adalah sebesar 1,47% dari total anggaran belanja. Standar deviasi menunjukkan nilai 0,0431831, hal ini berarti data memiliki nilai yang homogen.

Pembahasan Hasil Penelitian

Dari *chase processing summary* jumlah sampel valid sebanyak 367 sampel, dengan perincian Pemda dengan skor kinerja rendah sebanyak 5 Pemda. Pemda dengan skor kinerja sedang sebanyak 41 Pemda. Pemda dengan skor kinerja tinggi sebanyak 300 Pemda dan Pemda dengan skor kinerja sangat tinggi sebanyak 21 Pemda. Pada pengujian model fit, model hanya dengan *intercept* saja menghasilkan nilai $-2 \log \text{likelihood}$ 463,789, sedangkan jika variabel ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pusat, belanja modal dan temuan audit BPK dimasukkan ke dalam model, maka nilai $-2 \log \text{likelihood}$ turun menjadi 432,020 dan nilai signifikan 0,000 yang berarti model dengan variabel ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pusat, belanja modal dan temuan audit BPK, lebih baik dibandingkan hanya model dengan *intercept* saja. Jadi dapat disimpulkan bahwa model fit. Untuk nilai *Pseudo R-Square* sebesar 0,068 atau 6,8% artinya sebanyak 6,8% variasi skor kinerja pada kabupaten/kota dapat dijelaskan oleh variasi-variabel ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pusat, belanja modal, temuan audit BPK dan sisanya sebesar 93,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam model. Hasil uji *Parallel lines* untuk menilai apakah asumsi bahwa semua kategori memiliki parameter yang sama atau tidak, didapatkan nilai signifikansi di atas 0,05 yaitu sebesar 0,367 yang berarti model cocok.

Pengujian Hipotesis

Ordinal logistic regression (PLUM) digunakan untuk menguji pengaruh variabel ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pusat, belanja modal dan temuan audit BPK terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota. Untuk menguji signifikansi koefisien setiap variabel bebas yang digunakan *p-value (probability value)* dengan tingkat signifikansi sebesar 5% (0,05) yang artinya jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka koefisien regresi adalah signifikan. Hasil uji hipotesis dengan PLUM dapat dilihat dari tabel *parameter estimates*.

Tabel 3 Uji Hipotesis *Parameter Estimates*

		Estimate	
		β	Sig.
Threshold	[SC = 1,00]	6,090	,444
	[SC = 2,00]	8,540	,283
	[SC = 3,00]	13,719	,086
Location	Ln_TA	,381*	,159
	PAD	8,567	,020
	DAU	,084*	,947
	BM	-2,294*	,164
	TEMUAN	-6,749	,006

Keterangan : *) tidak signifikan

Sumber : data sekunder diolah, 2013.

Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Skor Kinerja Pemda Kabupaten/Kota

Penelitian ini menggunakan karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK sebagai variabel independen dan skor kinerja Pemda kabupaten/kota sebagai variabel dependen. Karakteristik pemerintah daerah dalam penelitian ini dijelaskan dengan ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pusat, belanja modal. Hasil pengujian dalam penelitian ini berhasil membuktikan secara empiris bahwa hipotesis kedua dan kelima dalam penelitian ini dapat **diterima**.

Hubungan Ukuran Pemda dengan Skor Kinerja Pemda Kabupaten/Kota

Hasil uji regresi logistik ordinal hipotesis pertama penelitian ini menyimpulkan tidak berpengaruh terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota. Sesuai dengan hasil analisis, berarti kenaikan total aset tidak mempengaruhi probabilitas kenaikan skor kinerja Pemda kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori rendah, sedang dan tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa peran ukuran pemerintah daerah dalam meningkatkan skor kinerja Pemda kabupaten/kota belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya jika dilihat secara parsial. Pemda dengan ukuran yang besar seharusnya memiliki tekanan yang besar untuk melakukan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta pengungkapan atas laporan kerjanya. Pemerintah daerah dalam melakukan pengungkapan atas laporan kerjanya akan lebih terdorong untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat *good news*, sehingga kerjanya semakin baik. Selain itu dengan ukuran yang besar dalam pemerintah akan memberikan kemudahan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam memberi pelayanan masyarakat yang memadai. Tidak berpengaruhnya ukuran daerah terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota kemungkinan karena Pemda belum dapat mengelola dengan baik aset yang dimilikinya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jika dilihat dari statistik deskriptif ukuran daerah, nilai rata-rata untuk tiap kategori hampir sama, hal ini mengindikasikan baik Pemda memiliki total aset yang kecil maupun besar memiliki probabilitas untuk mendapatkan skor kinerja tinggi ataupun rendah yang sama. Hal ini berarti ukuran daerah tidak terlalu diperhitungkan dalam pemberian skor kinerja oleh Kementrian Dalam Negeri sehingga hasilnya tidak signifikan.

Hasil dalam penelitian ini tidak mendukung penelitian Mustikarini dan Fitriyasi (2012) yang menyimpulkan bahwa ukuran Pemda berpengaruh positif signifikan terhadap skor kinerja Pemda Kabupaten/Kota di Indonesia, Kusumawardani (2012) dan Sumarjo (2010) yang menyimpulkan bahwa ukuran Pemda berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan Pemda Kabupaten/Kota di Indonesia.

Hubungan Tingkat Kekayaan Daerah dengan Skor Kinerja Pemda Kabupaten/Kota

Hasil uji regresi logistik ordinal hipotesis kedua penelitian ini berpengaruh positif signifikan terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota. Sesuai dengan hasil analisis, berarti kenaikan tingkat kekayaan daerah satu satuan akan menaikkan probabilitas kategori rendah sebesar 99,99995689%, menaikkan probabilitas kategori sedang sebesar 0,00003939% dan menaikkan probabilitas kategori tinggi sebesar 0,00000370%.

PAD merupakan salah satu sumber pendanaan yang digunakan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah yang berimplikasi pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Sumarjo, 2010). Selain itu pendapatan asli daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Pemda dengan ukuran dan kekayaan asli daerah (PAD) yang besar seharusnya memiliki nilai skor kinerja yang tinggi. Jika Pemda dengan ukuran dan PAD yang besar ternyata memiliki nilai skor yang rendah maka Pemda tersebut harus melakukan evaluasi atas kerjanya bahwasanya kerjanya berarti tidak lebih baik dibanding Pemda dengan ukuran dan PAD yang memang lebih kecil. Pemda dengan ukuran dan PAD yang besar dituntut untuk lebih baik dalam mengelola dan memanfaatkan kekayaan yang dimilikinya demi pelayanan kepada masyarakat.

Hasil dalam penelitian ini mendukung penelitian Mustikarini dan Fitriyasi (2012) yang menyimpulkan bahwa tingkat kekayaan daerah yang diukur melalui nilai PAD terhadap total pendapatan Pemda berpengaruh positif signifikan terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota. Penelitian Sumarjo (2010) yang menyimpulkan *intergovernmental revenue* diukur dengan besarnya PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemda. Serta penelitian Julitawati, *et al* (2012) yang menyimpulkan pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan secara simultan

dan parsial *berpengaruh* terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di provinsi Aceh. Penelitian ini tidak mendukung penelitian Wenny (2012) yang menyimpulkan PAD tidak mempengaruhi kinerja keuangan Pemda.

Hubungan Tingkat Ketergantungan Daerah Kepada Pemerintah Pusat dengan Skor Kinerja Pemda Kabupaten/Kota

Hasil uji regresi logistik ordinal hipotesis ketiga penelitian ini tidak berpengaruh terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota. Sesuai dengan hasil analisis, berarti kenaikan dana alokasi umum tidak mempengaruhi probabilitas kenaikan skor kinerja Pemda kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori rendah, sedang dan tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa peran dana alokasi umum dalam meningkatkan skor kinerja Pemda kabupaten/kota belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya jika dilihat secara parsial.

Tidak berpengaruhnya tingkat ketergantungan dengan pusat terhadap skor kinerja, kemungkinan dikarenakan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tidak hanya mempertimbangkan sisi kinerja keuangan saja, sehingga tidak ada keterkaitan antara besarnya DAU terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota dan memperoleh hasil yang tidak signifikan. Hal ini bisa dilihat dari statistik deskriptif, tingkat ketergantungan dengan pemerintah yang diukur dengan besarnya DAU, memiliki nilai rata-rata yang hampir sama pada setiap kategori. Dalam penentuan skor kinerja, yang merupakan hasil dari EKPPD, tidak hanya aspek kinerja keuangan saja namun juga kinerja nonkeuangan Pemda sehingga hasilnya tidak signifikan. Selain itu kemungkinan lain adalah Pemda tidak transparan dalam melaporkan penggunaan DAU, serta penggunaan DAU yang tidak tepat sasaran. Dalam penggunaan DAU Pemda seharusnya menggunakan DAU sesuai dengan kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan dan lain lain sehingga pelayanan kepada masyarakat akan lebih baik.

Hasil dalam penelitian ini tidak mendukung penelitian penelitian Mustikarini dan Fitriyasi (2012) yang menyimpulkan bahwa tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat yang diukur dengan besarnya DAU dibandingkan dengan total pendapatan Pemda berpengaruh positif signifikan terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota. Serta penelitian Julitawati, *et al* (2012) yang menyimpulkan dana alokasi umum secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di provinsi Aceh.

Hubungan Belanja Modal dengan Skor Kinerja Pemda Kabupaten/Kota

Hasil uji regresi logistik ordinal hipotesis keempat penelitian ini tidak berpengaruh terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota. Sesuai dengan hasil analisis, berarti kenaikan dana alokasi umum tidak mempengaruhi secara parsial probabilitas kenaikan skor kinerja Pemda kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori rendah, sedang dan tinggi.

Tidak berpengaruhnya tingkat ketergantungan dengan pusat terhadap skor kinerja jika dilihat dari statistik deskriptifnya, nilai rata-rata belanja modal antara kategori rendah dan tinggi memiliki nilai yang sama, untuk kategori sangat tinggi memiliki rata-rata paling kecil, dan untuk kategori sedang, memiliki nilai rata-rata tertinggi. Sehingga belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota.

Dilihat dari arah hasil penelitian ini, arah tersebut tidak sesuai dengan hipotesis, hal ini mengindikasikan semakin besar belanja modal maka semakin rendah skor kinerja yang dimiliki oleh daerah tersebut. Hal ini kemungkinan dikarenakan adanya asimetri informasi antara pihak agen (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap belanja modal dengan pihak *principal* (masyarakat). Adanya asimetri informasi inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh agen (pemerintah), terlihat dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang melaporkan adanya penyimpangan ketentuan perundang-undangan terhadap belanja modal untuk fasilitas umum sebanyak 1.453 kasus sepanjang semester II/2012 (Prihatmoko, 2013). Selain itu dengan besarnya belanja modal, dianggap satu daerah itu tidak efisien dalam pengelolaan keuangannya.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Mustikarini dan Fitriyasi (2012) yang menyimpulkan bahwa belanja Pemda berpengaruh negatif signifikan terhadap skor kinerja Pemda

kabupaten/kota. Serta penelitian Nugroho dan Rohman (2012) yang menyimpulkan belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan.

Hubungan Temuan Audit BPK dengan Skor Kinerja Pemda Kabupaten/Kota

Hasil uji regresi logistik ordinal hipotesis kelima penelitian ini berpengaruh negatif signifikan terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota. Sesuai dengan hasil analisis, berarti kenaikan temuan audit BPK satu satuan akan mempengaruhi probabilitas penurunan skor kinerja Pemda kabupaten/kota kategori rendah sebesar 99,99973448%, kategori sedang sebesar 0,00024260% dan kategori tinggi sebesar 0,00002278%.

Hasil dari penelitian ini terkait dengan temuan audit BPK menunjukkan bahwa, semakin besar jumlah temuan audit BPK pada suatu Pemda maka semakin rendah skor kinerja Pemda tersebut. Hal ini berarti Pemda harus lebih berhati-hati dalam masalah pengelolaan keuangan negara karena hal ini tidak hanya terkait dengan masalah secara akuntansi saja tapi juga terkait dengan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

Hasil dalam penelitian ini mendukung penelitian penelitian Mustikarini dan Fitriyasi (2012) yang menyimpulkan bahwa temuan audit BPK berpengaruh negatif signifikan terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel ukuran pemerintah daerah dengan proksi total aset, variabel tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat dengan proksi DAU dibanding total pendapatan dan variabel belanja modal dengan proksi belanja modal dibanding total realisasi belanja terbukti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota. Sedangkan, variabel temuan audit BPK dengan proksi temuan audit dibanding total anggaran belanja, variabel tingkat kekayaan daerah dengan proksi PAD dibanding total pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota di Indonesia.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, sampel yang digunakan dalam penelitian hanya satu tahun, karena sulitnya mendapatkan data sehingga belum dapat melihat kecenderungan tren kinerja pemerintah daerah dalam jangka panjang. Kedua, data yang digunakan adalah data lama, data terbaru belum lengkap saat dilakukan penelitian. Penggunaan tahun yang lebih baru serta cakupan yang lebih baru luas akan dapat memberikan gambaran yang lebih terkini dan akurat dari kinerja pemerintah daerah di Indonesia.

Saran

Dari kesimpulan dan keterbatasan penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan LPPD untuk beberapa tahun karena penilaian skor kinerja atas LPPD ini dilakukan secara rutin oleh Kementerian Dalam Negeri setiap tahun, dimulai tanggal 14 Agustus 2009 untuk LPPD tahun 2007. Selain itu untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan variabel lain yang menjadi indikator kinerja kunci (IKK) dan menjadi komponen dalam penilaian skor kinerja seperti misalnya terkait dengan kinerja keuangan Pemda dan kinerja bidang urusan wajib yang menjadi tanggung jawab Pemda, seperti misalnya *leverage* tingkat pertumbuhan ekonomi atau variabel lain diluar kinerja keuangan seperti jumlah penduduk, jumlah pegawai dan jumlah fasilitas umum dan lain-lain. Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya bisa menjelaskan 6,8% variabel dependen. Dengan demikian 93,25% sisanya diterangkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Sehingga dengan menambah variabel lain, diharapkan dapat menjelaskan skor kinerja Pemda kabupaten/kota lebih baik.

REFERENSI

- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 19*. Edisi 4. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gudono. 2009. *Teori Organisasi*. Yogyakarta: Pencil.
- Halim, Abdulah dan Abdullah, Syukuriy. 2005. "Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi)". <http://kelembagaandas.wordpress.com/teori-agensi-principal-agent-theory/abdul-halim-dan-syukriy-abdullah/>: Diakses tanggal 30 Mei 2013
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat.
- Januarti, Indira. 2009. "Analisis Pengaruh Faktor Perusahaan, Kualitas Auditor, Kepemilikan Perusahaan Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern (Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)". Paper disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi 12 (SNA 12), Palembang, 4 - 6 November 2009
- Jensen, M dan W. Meckling. 1976. Theory of the Firm; Managerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure. *Jurnal of Financial Economics*, p 305-360.
- Lane, Jan-Erik. 2000. *The Public Sector – Concepts, Models and Approaches*. London: SAGE Publications.
- M. Haris Raedy Harts. 2011. Pengaruh Kualitas Audit, Kondisi Keuangan, Manajemen Laba, dan Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Opini Audit *Going Concern*. Skripsi Sarjana. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Moe, T. M. 1984. The new economics of organization. *American Journal of Political Science* 28(5): 739-777.
- Mustikarini, Widya Astuti dan Fitriasisi, Debby. 2012. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007. Forum: *Simposium Nasional Akuntansi 15*, <http://www.sna.akuntansi.unikal.ac.id>
- Nugroho, Fajar dan Rohman, Abdul. 2012. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Propinsi Jawa Tengah). Skripsi Sarjana. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta : Kementrian Dalam Negeri.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta : Kementrian Dalam Negeri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Jakarta : Kementrian Dalam Negeri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Jakarta : Kementrian Dalam Negeri.



- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Jakarta : Kementrian Dalam Negeri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta : Kementrian Dalam Negeri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta : Kementrian Dalam Negeri.
- Rahmanurrasjid, Amin. 2008. Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Daerah. Tesis. Pasca Sarjana. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Setiawan, Wahyu. 2012. Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia. Skripsi Sarjana. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Suhardjanto, D dan Yulianingtyas, R.R. 2011. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia)". *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Volume 8/No. 1/November 2011: 1-94
- Sumarjo, Hendro. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia. Skripsi Sarjana. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.